

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap masyarakat pasti memiliki tujuan untuk memiliki kehidupan yang layak, yang mencakup kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jika semua kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan masyarakat telah berhasil mencapai kehidupan yang layak. Namun, nyatanya tidak semua kalangan masyarakat dapat mencapai kehidupan yang layak dengan mudah. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan tertentu seperti Penyandang Disabilitas, mereka sering kali mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal tersebut dikarenakan Penyandang Disabilitas sering dianggap lemah karena memiliki kekuatan atau kemampuan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok lain (Ademokoya, 2023). Pandangan ini menciptakan stigma dan kesulitan bagi Penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta menghambat mereka untuk mencapai kehidupan yang layak.

Menurut konteks ilmiah, Penyandang Disabilitas merujuk pada individu yang menghadapi suatu keterbatasan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari dikarenakan hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam masa yang panjang sehingga mengakibatkan hambatan dalam menjalin hubungan dengan lingkungan

sekitar dan kesulitan untuk berpartisipasi secara menyeluruh dan efektif dengan masyarakat yang lain berdasarkan prinsip kesetaraan hak (UU, 2016). Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, 2001) mendefinisikan disabilitas sebagai interaksi antara individu dengan kondisi kesehatan yang berbeda dan hambatan lingkungan serta sikap yang menghalangi partisipasi penyandang disabilitas secara penuh dan efektif dalam bermasyarakat.

Ragam atau jenis Penyandang Disabilitas mencakup beragam kondisi yang mempengaruhi kegunaan fisik, intelektual, mental, dan sensorik setiap individu. Disabilitas fisik melibatkan masalah pada fungsi gerak seperti kelumpuhan, anggota tubuh yang diamputasi, dan kondisi akibat penyakit atau kelainan genetik. Disabilitas mental mencakup permasalahan pada fungsi berpikir, perilaku, dan emosi, termasuk diantaranya yaitu autisme, hiperaktivitas, dan gangguan pada psikososial seperti penyakit *skizofrenia* dan depresi. Disabilitas intelektual merujuk pada permasalahan fungsi berpikir yang diakibatkan tingkat kecerdasannya berada di bawah rata-rata, seperti disabilitas grahita dan *down syndrome*. Disabilitas sensorik melibatkan permasalahan pada salah satu fungsi panca indera, seperti tunanetra, tunarungu, dan gangguan wicara (Haryanto & Iriyanto, 2021).

Menurut informasi terkini, jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada data statistik, jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia mencapai jutaan orang. Kondisi ini disebutkan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada siaran pers bulan Maret tahun 2023 sebagai berikut:

**Kominfo.go.id**- “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk Penyandang Disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta. BPS juga mengungkap ada sebanyak 7,6 juta dari 17 juta orang Penyandang Disabilitas usia produktif yang bekerja.”  
(Sumber: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers) diakses pada Sabtu, 27 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dari tahun 2021 ke 2022 yaitu sebesar 6 juta Penyandang Disabilitas. Kemudian, data menunjukkan bahwa dari 17 juta Penyandang Disabilitas pada kategori usia produktif, sebanyak 7,6 juta orang telah memperoleh pekerjaan. Sehingga, meninggalkan 9,4 juta orang Penyandang Disabilitas yang berada pada kategori usia produktif masih belum bekerja. Dari data tersebut berarti menunjukkan bahwa sisanya, sekitar 5,5 juta jiwa adalah Penyandang Disabilitas pada kategori anak-anak dan lanjut usia.

Lebih banyaknya jumlah Penyandang Disabilitas pada usia produktif yang belum bekerja menunjukkan bahwa mereka, yang seharusnya sudah mampu mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri pada usia tersebut, masih menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan individu non-disabilitas untuk memperoleh penghasilan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hambatan tersebut tidak hanya memberikan dampak pada kemampuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi, namun juga berpotensi membebani anggota keluarga lainnya. Sehingga, akan memperburuk tingkat kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan ekonomi juga mengalami kesulitan dalam aspek lain seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan. Banyak sekolah umum tidak memiliki fasilitas yang memadai atau tenaga pengajar yang terlatih untuk menangani kebutuhan pelajar yang menyandang disabilitas, sehingga mereka tidak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Ketidakmampuan ini memperburuk peluang mereka di pasar kerja. Selain itu, akses ke layanan kesehatan seringkali terbatas karena biaya yang tinggi dan kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, membuat mereka semakin bergantung pada orang lain karena kesulitan melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (Allo, 2022).

Hak-hak Penyandang Disabilitas telah dijamin oleh konvensi internasional dan hukum nasional dalam bentuk peraturan pemerintah. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) menyatakan dengan pasti bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga lainnya, mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi secara penuh dalam kehidupan bersosial dan berpolitik (United Nations, 2006). Pada tingkat nasional, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas yang termasuk hak untuk hidup, bebas dari stigma, pendidikan yang setara, pekerjaan dan kewirausahaan, kesehatan, aksesibilitas, partisipasi, dan kesejahteraan sosial (UU, 2016).

Sebagai bentuk untuk memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, maka perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat yang signifikan. Pemberdayaan ini sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Pemberdayaan dalam konteks ini, menurut (Moran et al., 2017:120) mengacu pada pemberdayaan yang melibatkan penghindaran cara-cara partisipasi dan pengaruh tradisional yang sering kali membatasi keterlibatan individu yang tidak “sesuai dengan pola”. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan secara lebih inklusif, sehingga mereka dapat lebih mudah mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam mencapai kesejahteraan sosial di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi pengukur keberhasilan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dinilai dari usia yang panjang dan hidup yang sehat, pengetahuan yang dimiliki, dan kualitas hidup yang memadai. Suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, mencerminkan bahwa daerah tersebut telah berhasil memberikan akses yang lebih baik kepada warganya tanpa terkecuali bagi Penyandang Disabilitas. Seperti di Kota Salatiga, sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia paling maju di Indonesia, kota ini berhasil masuk dalam peringkat 5 besar dengan skor IPM 84,99 pada tahun 2023. Skor tersebut juga menjadi nilai IPM tingkat Kota/Kabupaten tertinggi di Provinsi Jawa Tengah (Lubis, 2024).

Salah satu komponen penting dalam IPM adalah peningkatan pengetahuan masyarakat. Dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada masyarakat Penyandang Disabilitas, peningkatan pengetahuan dilakukan

melalui peningkatan literasi yang mampu meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui adanya peran penting perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan untuk masyarakat. Hal ini tercermin dalam pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang bertujuan mengukur upaya pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Ini sejalan dengan inisiatif nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang dimana saat ini perpustakaan tidak hanya difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan buku-buku dan sumber informasi. Melalui adanya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang telah diterapkan di Kota Salatiga, perpustakaan diharapkan dapat menjadi ruang untuk mentransformasikan diri dengan meningkatkan keterampilan dan memberdayakan komunitas lokal, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Haryanti, 2019).

Berdasarkan data nilai IPLM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang diperoleh dari Laporan PERPUSNAS RI, Kota Salatiga menempati posisi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai IPLM sebesar 94,48 (PERPUSNAS RI, 2023a). Angka ini menunjukkan tingginya tingkat literasi masyarakat di Kota Salatiga. Tentu saja keberhasilan ini tidak terlepas dari peran penting perpustakaan dalam menyediakan akses layanan terhadap informasi dan sumber belajar bagi masyarakat di Kota Salatiga. Hal ini sejalan dengan komitmen dari Pemerintah Kota Salatiga dalam memenuhi hak Penyandang

Disabilitas atas akses layanan perpustakaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Yang kemudian secara lebih rinci hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan mereka.

Berdasarkan data jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Salatiga tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2027, terdapat 791 orang yang termasuk dalam kategori Masyarakat Penyandang Disabilitas. Adapun pembagian menurut usia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas dibagi per-usia di Kota Salatiga Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Usia &lt; 15th</b>	<b>Usia 15-44<sup>th</sup></b>	<b>Usia 45-59<sup>th</sup></b>	<b>Usia &gt; 60 th</b>	<b>Total</b>
Argomulyo	11	80	49	46	186
Sidomukti	14	85	41	50	190
Sidorejo	12	91	45	70	218
Tingkir	13	80	49	55	197
<b>Total</b>	50	<b>336</b>	184	221	<b>791</b>

Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah Penyandang Disabilitas yang terbanyak di Kota Salatiga pada tahun 2020 berada pada usia produktif, yaitu usia 15-44 tahun, dengan total sebanyak 336 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa populasi Penyandang Disabilitas pada kategori usia produktif cukup signifikan, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam hal

pemberdayaan agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan banyaknya Penyandang Disabilitas pada usia produktif, kegiatan pemberdayaan yang tepat sasaran menjadi sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam dunia kerja dan kehidupan mandiri.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga sebagai pihak yang berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat penyandang disabilitas sebagai perwujudan dari adanya program nasional yaitu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), untuk itu Dinas menginisiasi adanya kegiatan peningkatan keterampilan dan pengembangan kemampuan yang dilakukan melalui Kelas Literasi. Kelas Literasi merupakan wadah pembelajaran pengguna perpustakaan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada literasi dasar, tetapi juga mengajarkan pemanfaatan teknologi yang adaptif, serta keterampilan komunikasi yang baik agar masyarakat bisa lebih mandiri dan berdaya. Kelas Literasi bertujuan untuk menciptakan akses pendidikan yang setara dan membuka lebih banyak peluang pengguna perpustakaan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kegiatan Kelas Literasi ini dijalankan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kota Salatiga, termasuk disabilitas dalam pelatihan yang dapat mendukung mereka untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Penerima manfaat dari Kelas Literasi yang khusus untuk disabilitas ini adalah komunitas disabilitas yang berada dalam kelompok usia produktif, yaitu 15-44 tahun. Kelompok usia ini dipilih karena dianggap paling mampu untuk menerima

pelatihan keterampilan baru dan memanfaatkannya guna meningkatkan kesejahteraan, baik dalam konteks pekerjaan maupun usaha mandiri.

Berdasarkan dari hasil observasi awal, Kelas Literasi yang sudah ada sejak tahun 2021 ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelas pelatihan yang bervariasi. Kelas ini merupakan suatu inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dengan menggandeng berbagai macam komunitas lokal di Kota Salatiga. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi baru yang dapat langsung dipraktikkan pada saat kelas berlangsung. Materi yang disampaikan pada Kelas Literasi ini diberikan oleh orang yang ahli pada bidangnya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga, yang menjadikan Kelas Literasi ini program yang relevan dan bermanfaat secara berkelanjutan.

Hingga saat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyelenggarakan lebih dari 20 Kelas Literasi yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Salatiga termasuk beberapa kelas diantaranya juga dapat diikuti oleh Penyandang Disabilitas. Masing-masing kelas memberikan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan topik yang dibahas. Kelas-kelas ini dibuka berdasarkan permintaan dari masyarakat yang memerlukan pelatihan maupun pendampingan. Pemberian pendampingan pada kegiatan pelatihan dapat menjadi cara yang efektif dalam mengembangkan keterampilan Penyandang Disabilitas, sehingga dapat memberikan manfaat baik yang dapat membentuk kemandirian pada Penyandang Disabilitas (Medalla & Medalla, 2018:165). Oleh karena itu, Kelas Literasi tidak hanya difungsikan sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga

sebagai upaya strategis untuk memperkuat inklusi sosial dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kota Salatiga. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap Penyandang Disabilitas, karena mereka memiliki kekurangan yang berbeda-beda sesuai jenis/kelompok Penyandang Disabilitas. Adapun jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan jenisnya di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Penyandang Disabilitas menurut ragam dan jenis kelamin di Kota Salatiga Tahun 2023**

<b>Ragam Penyandang Disabilitas</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
Penyandang Disabilitas Fisik	193	127	320
Penyandang Disabilitas Sensorik	39	37	76
Penyandang Disabilitas Mental	69	62	131
Penyandang Disabilitas Intelektual	95	71	166

Sumber: Dinas Sosial Kota Salatiga pada [data.salatiga.go.id](http://data.salatiga.go.id), data diolah peneliti, 2024

Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Salatiga, Kelas Literasi yang telah dilaksanakan difokuskan pada Penyandang Disabilitas Sensorik khususnya pada tunanetra dan tunarungu wicara dan Disabilitas Fisik pada tuna daksa. Ini disebabkan karena Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental masih perlu pengobatan dan intervensi medis sebelum dapat berpartisipasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli juga mempengaruhi pemilihan prioritas peserta pelatihan. Pemilihan Penyandang Disabilitas Sensorik dan Disabilitas Fisik ini karena mereka dianggap masih memiliki potensi untuk menerima pelatihan serta tetap mampu bersosialisasi dengan dukungan yang relatif lebih sederhana. Berikut adalah pembagian kelas-kelas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga yang dibagi berdasarkan peserta dari Penyandang Disabilitas:

**Tabel 1.3 Data Kelas Literasi berupa kegiatan pelatihan yang diikuti Penyandang Disabilitas di Kota Salatiga**

Penyandang Disabilitas	Kegiatan Pelatihan	Jumlah Peserta	Tahun Pelaksanaan	
			2022	2023
Tunanetra	Kelas SPA/Massage (Pijat)	2 orang	-	10, 17, 24, dan 31 Mei
	<i>Digital Marketing</i>	35 orang	13 September 26 Oktober	-
Tunarungu wicara / Bisu Tuli	<i>Digital Marketing</i>	19 orang	6 Agustus 17 September	-
	Barista	19 orang	8 Oktober 22 Oktober	-
	Handycraft	20 orang	29 Oktober	-
	Kerajinan Kulit	27 orang	5 November	-
Tunadaksa	Kerajinan Kulit	5 orang	5 November	-

Sumber: Dokumen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, 2023

Untuk memperkaya materi pelatihan pada Kelas Literasi ini, Dinas juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Pada kelas *Digital Marketing* dan kelas SPA/Massage (Pijat), didukung oleh Komunitas Sentir Indonesia yang memiliki kepanjangan senantiasa berbagi ilmu dan keterampilan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat dengan fokus untuk menaikkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai ruang pelatihan serta produk kreatif. Pada kelas barista, bekerja sama dengan Komunitas Kopi Lovers (KOPLO), yang memiliki pengalaman luas dalam pembuatan minuman yang terkhusus pada kopi serta melibatkan salah satu pemilik usaha di Salatiga yang bergerak dibidang kopi sebagai pemateri. Pada kelas kerajinan kulit, berkolaborasi dengan Seniman Kulit yaitu Cetul Leather Art. Pada kelas *Handycraft*, berkolaborasi dengan tim Sapu Upcycle yang merupakan usaha yang bergerak dibidang pemanfaatan lingkungan yaitu mengubah sampah menjadi

produk yang memiliki nilai lingkungan yang lebih baik. Adapun disediakan juru bicara bahasa isyarat untuk membantu peserta memahami materi yang disampaikan. Upaya ini ditujukan agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan optimal, terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka pada bidang yang ingin mereka tekuni.

Adapun wujud nyata kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Kelas Literasi yang melibatkan Penyandang Disabilitas adalah kelas barista atau pembuatan minuman kopi yang diikuti oleh masyarakat tunarungu wicara atau bisu tuli di Kota Salatiga dengan aktualisasinya berupa tempat usaha yaitu Cafe Hening (Apriyono, 2023).

**Liputan6.com** - “Cafe Hening menjadi menarik karena para barista di kafe ini merupakan penyandang tunarungu wicara atau bisu tuli. Cafe Hening Salatiga merupakan bentuk aktualisasi dari Kelas Literasi dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS), yang digawangi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dengan melibatkan Komunitas Sahabat Tuli. Uniknya, para konsumen yang ingin memesan kopi harus menggunakan simbol-simbol isyarat yang dipasang di atas meja. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri.”

(Sumber: <https://www.liputan6.com/regional/read/5334867/santai-sore-di-kafe-hening-salatiga-wadah-literasi-yang-baristanya-para-tuna-rungu-wicara> diakses pada Selasa, 30 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diketahui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga telah mengambil inisiatif untuk mendukung masyarakat tunarungu wicara atau bisu tuli dengan menyediakan fasilitas tambahan setelah pelaksanaan Kelas Literasi barista. Penyediaan fasilitas ini berupa tempat usaha minuman yang berlokasi di depan gedung Perpustakaan Daerah Kota Salatiga. Kehadiran Cafe Hening tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk bersosialisasi, berkreasi, serta meningkatkan

kesejahteraan hidup. Selain itu, keunikan usaha ini juga menarik perhatian masyarakat sekitar, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan di masa mendatang.

Dampak positif dari pelaksanaan Kelas Literasi yang didukung oleh keberadaan Cafe Hening ini didokumentasikan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga pada laman youtube resmi Dinpersip Salatiga. Dokumentasi ini juga diikutsertakan dalam salah satu lomba perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2023 yaitu pada kategori video cerita pendek dampak dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berdasarkan hal-hal positif yang terjadi dari Kelas Literasi hingga aktualisasi nyata berupa tempat usaha tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga menjadi pemenang dalam lomba yang diadakan PERPUSNAS RI tersebut.



**Gambar 1.1 Penghargaan dari PERPUSNAS RI kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2023**

Sumber: Unggahan Instagram @dinersipsalatiga, 2023

Perolehan penghargaan tersebut, bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, mengingat karena Masyarakat Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk beradaptasi pada lingkungan sosial, maka ini merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dengan menyelenggarakan suatu kegiatan yang dinamakan Kelas Literasi dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan potensi masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas. Kelas Literasi ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas, tetapi juga berdampak positif pada kepercayaan diri dan kemandirian mereka di masa mendatang.

Keberadaan Pemerintah memang sangat penting bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas yang menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pelatihan pada Kelas Literasi yang telah dilakukan di Kota Salatiga melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini merupakan upaya dalam menciptakan suatu pemungkinan untuk membentuk pemberdayaan masyarakat yang inklusif dengan melibatkan kaum marginal seperti disabilitas, serta mampu membantu mereka menghadapi hambatan kultural dan struktural yaitu mengenai budaya literasi perpustakaan dan potensi tumpang tindih tupoksi pada setiap instansi. Kelas Literasi ini juga mendukung individu dengan disabilitas untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang mereka minati melalui pemberian materi dan praktik dalam pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, Kelas Literasi juga penting dalam melindungi mereka dari potensi diskriminasi dan bentuk persaingan yang tidak adil, dengan menyelenggarakan kegiatan yang dapat memperlihatkan hasil keterampilan disabilitas ke khalayak publik. Pendampingan secara intens dan dukungan yang berkelanjutan dalam kegiatan Kelas Literasi menyongkong disabilitas dalam meningkatkan keterampilan yang mereka peroleh sehingga dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga juga harus tetap menjaga lingkungan yang kondusif, sehingga mampu menciptakan keseimbangan yang memungkinkan individu dengan disabilitas untuk berkembang secara optimal, mampu memberikan manfaat nyata dan menjaga keberlanjutan Kelas Literasi dimasa mendatang.

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis melihat adanya keterkaitan antara kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Kelas Literasi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dengan teori strategi pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto (2021:67-68) yang dapat dilakukan dengan 5P yaitu meliputi pendekatan Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Strategi Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Kelas Literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah penelitian tentang “Bagaimana Strategi

yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Kelas Literasi di Kota Salatiga?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan terkait strategi yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Kelas Literasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi teoritis terhadap pemberdayaan masyarakat.
- b. Menawarkan pemahaman secara teori di bidang pemberdayaan dan faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan tentang pemberdayaan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi wadah untuk penulis bisa menerapkan teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dengan kondisi atau fakta di lapangan, khususnya dalam kajian strategi pemberdayaan.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat, serta sebagai tambahan referensi dan bacaan di perpustakaan. Selain itu, dapat menjadi tambahan data dan informasi yang bermanfaat dan berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk mahasiswa yang ada di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan gambaran yang baru bagi segenap Pemerintah Daerah Kota Salatiga khususnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga untuk dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.